

Kebijakan Berbasis Bukti Untuk Mendukung Pembangunan Inklusif

Sudarno Sumarto

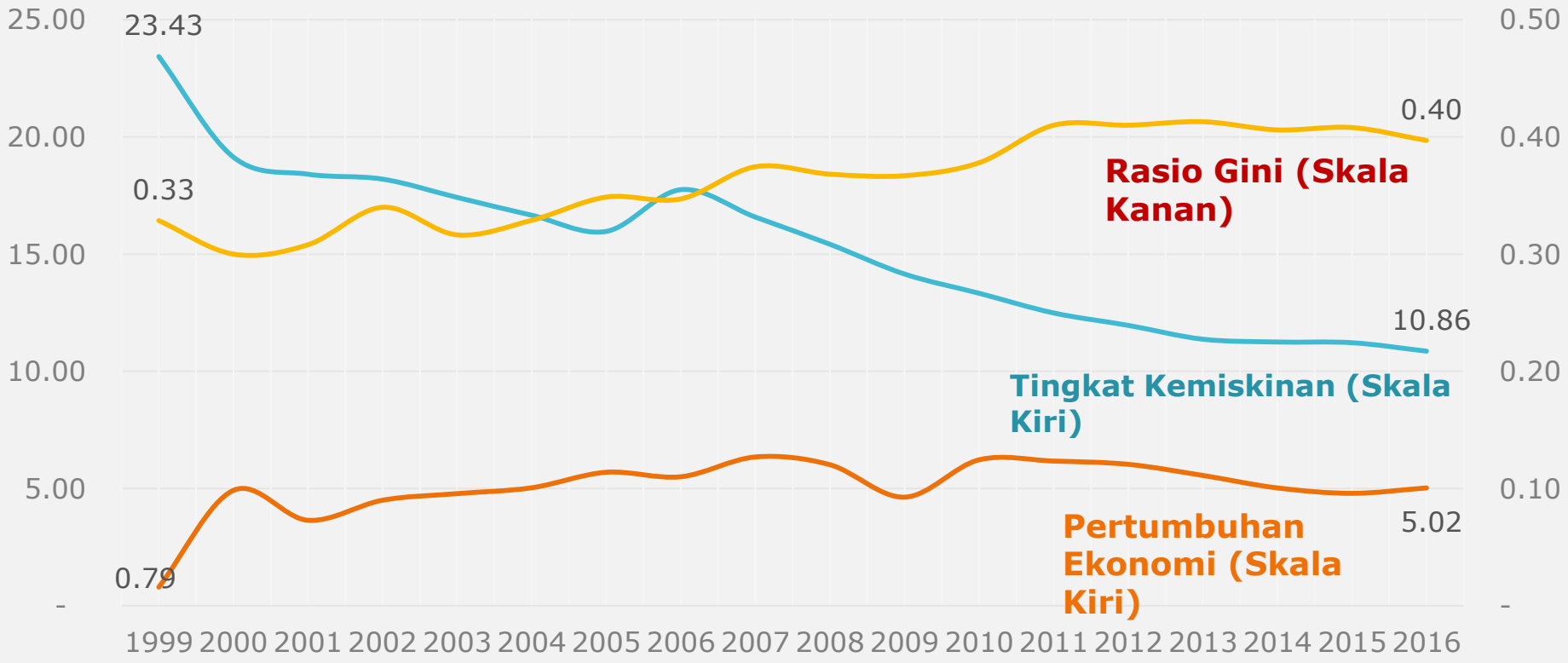
Penasihat Kebijakan
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Peneliti Senior
Lembaga Penelitian SMERU

Ikhtisar

- Arti Penting Pembangunan Inklusif di Indonesia
- Pengambilan Kebijakan Publik Berbasis Bukti
- Menerjemahkan Bukti Menjadi Kebijakan
- Pembelajaran yang Dapat Diambil

Arti Penting Pembangunan Inklusif di Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh Positif Sejak Krisis Asia
Disertai Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan

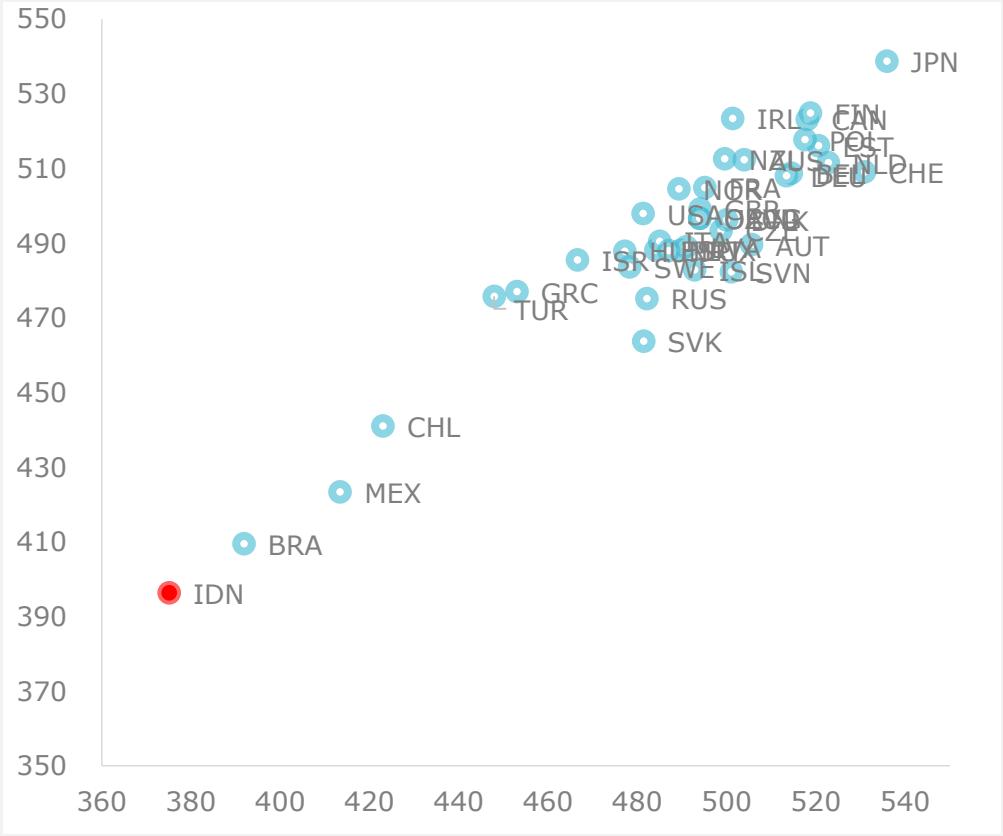


Perkapi (USD)	2,071.24	2,143.39	2,191.36	2,259.19	2,335.61	2,420.58	2,524.61	2,628.53	2,758.81	2,886.65	2,980.95	3,125.22	3,274.73	3,426.99	3,570.93	3,703.37	3,834.06

Perlu Upaya Untuk Melanjutkan Tren Penurunan Tersebut

Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Relatif Rendah

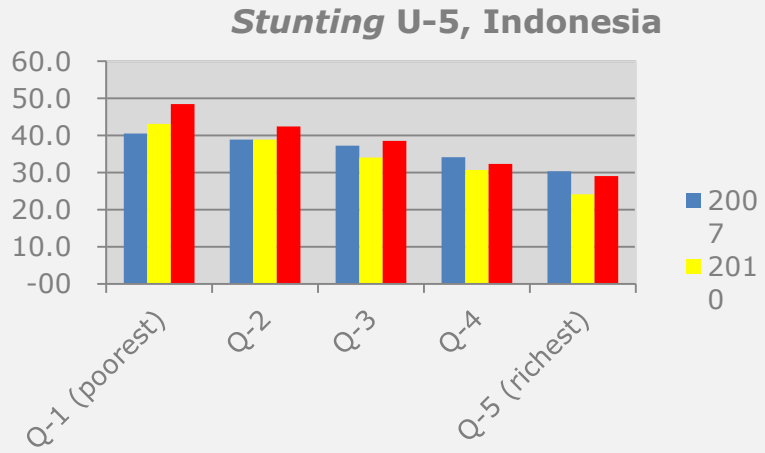
Hasil Tes Matematika Tertinggal Jauh



Perubahan Hasil Tes Matematika PISA Antar Negara, 2013

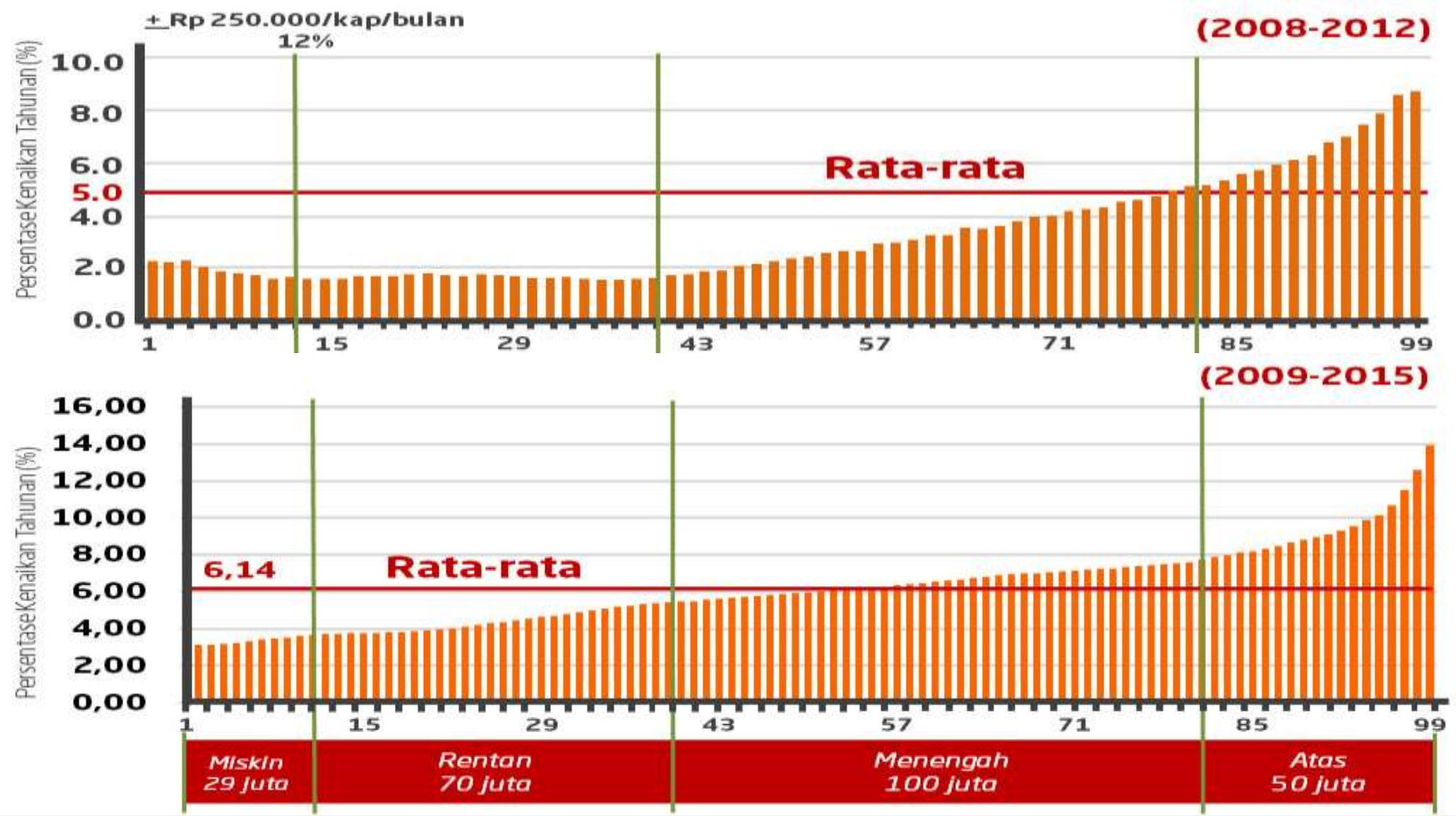
Prevalensi Malnutrisi dan *Stunting* Cukup Tinggi

Country	GNI/Capita 2012	Stunting[3]
Indonesia	**4730**	**36**
India	3910	48
China	9040	10
Philippines	4380	32
Vietnam	3620	36
Thailand	9280	12



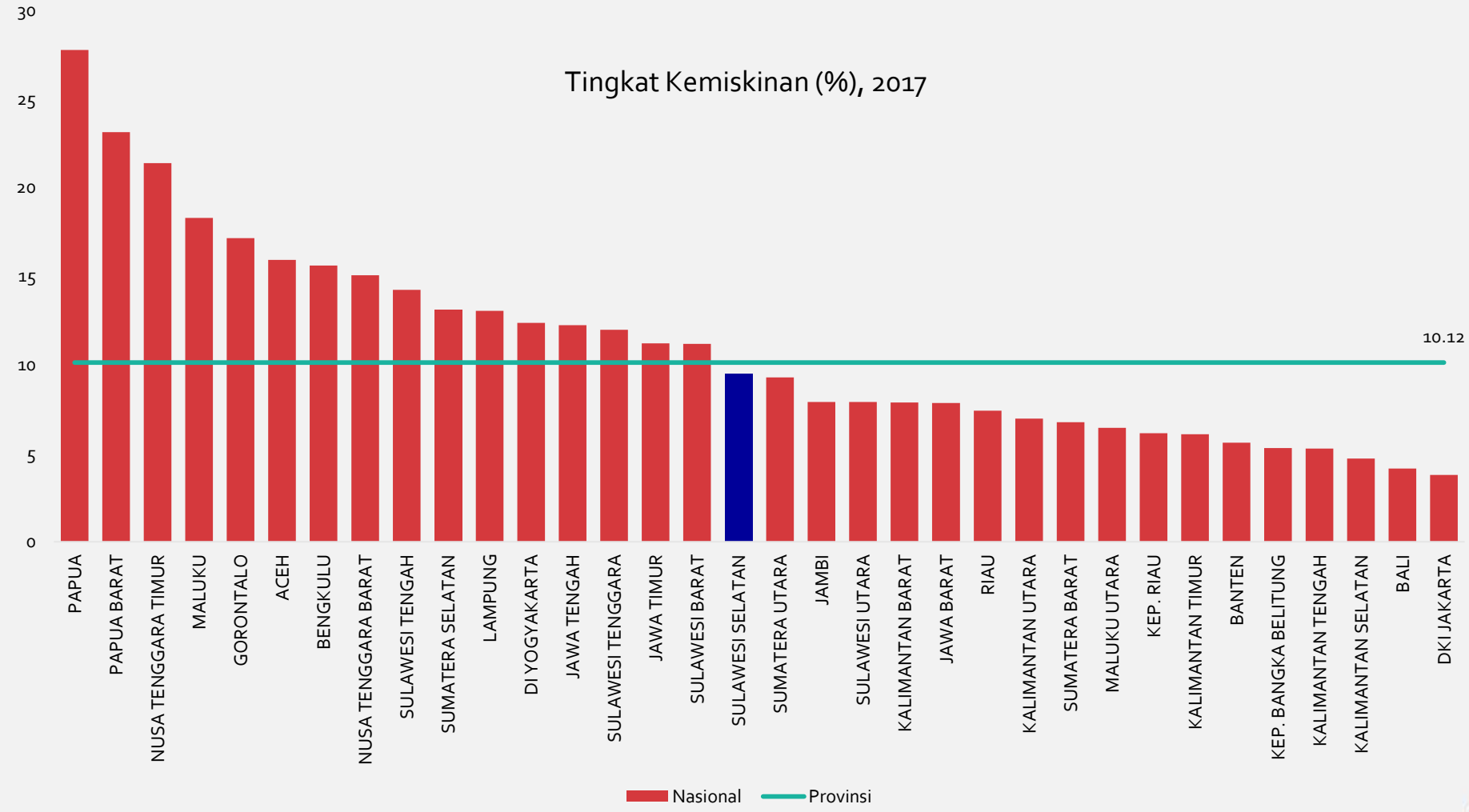
Sumber: 1 Lancet 2013; 2 Hoddinott et al 2013;
3 UN DATA 2006-2011;

Ketimpangan Dijelaskan oleh Pertumbuhan Pengeluaran Kelompok Atas Yang Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Kelompok Miskin

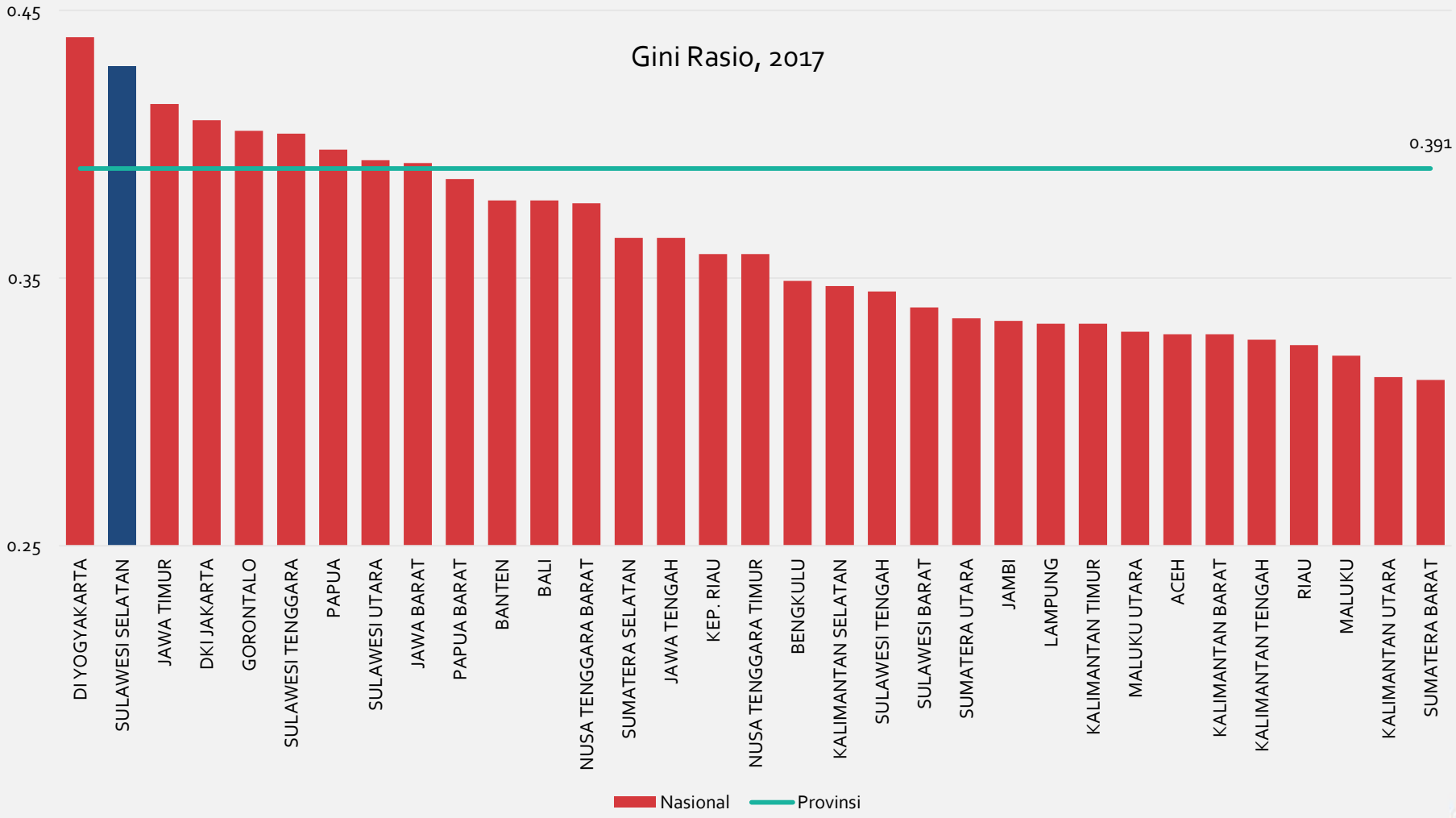


Namun Pertumbuhan Pengeluaran Kelompok Miskin Cenderung Terus Membaik

Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan Relatif Lebih Rendah Dibandingkan Nasional

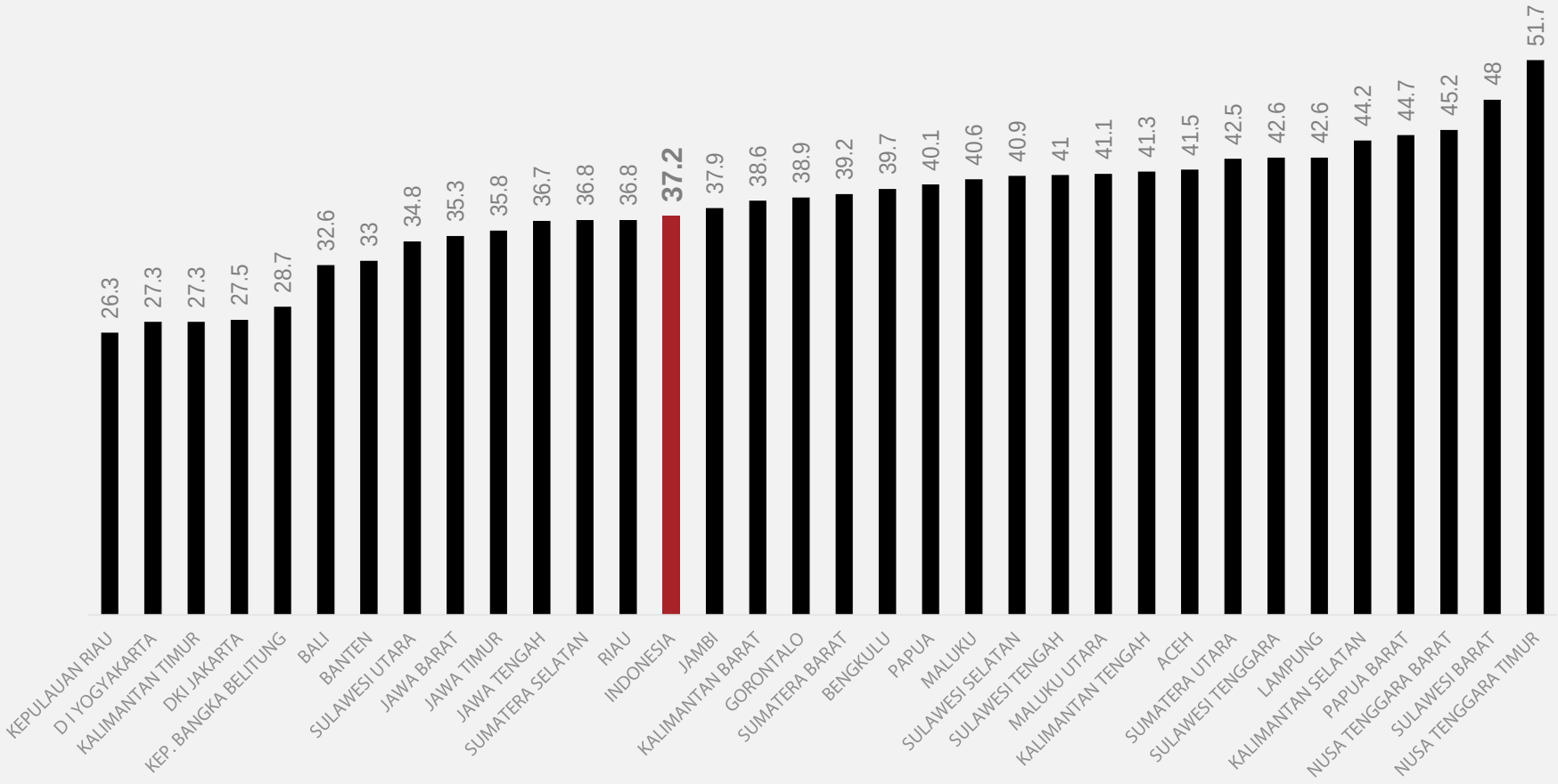


Namun Demikian, Tingkat Ketimpangan Sulawesi Selatan Tertinggi Nomor 2 di Indonesia



Tingkat Balita Stunted Sulawesi Selatan Lebih Tinggi dari Rata-rata Nasional

Persentase anak BALITA yang mengalami 'kekerdilan' menurut Propinsi di Indonesia, 2013



Pertumbuhan Inklusif dengan Kebijakan Sosial yang Aktif adalah Kunci



A Pertumbuhan Ekonomi

B Pengurangan Kemiskinan

C Pembangunan Manusia

D Penurunan Ketimpangan

E Penguatan Kontrak Sosial

Perlu Didukung oleh Kebijakan Berbasis Bukti yang Kuat

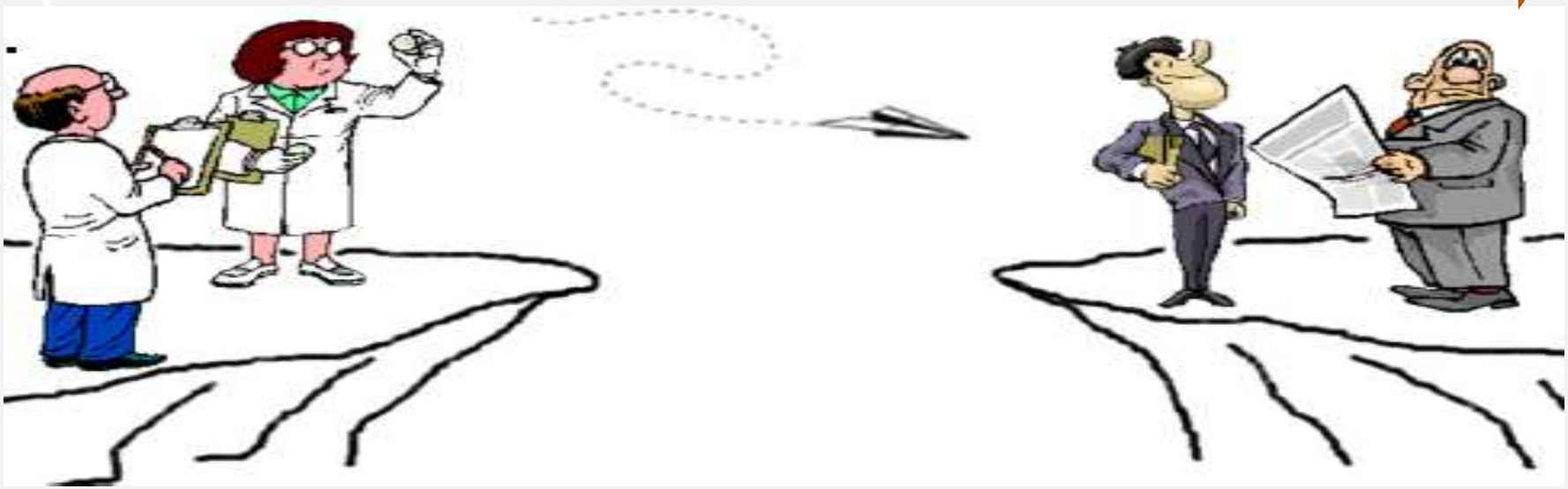
Pengambilan Kebijakan Publik Berbasis Bukti

Kondisi Ideal



Kesenjangan di Dunia Nyata

PENELITI | **PENGAMBIL KEBIJAKAN**



Peneliti tidak dapat memahami mengapa pengambil kebijakan mengabaikan rekomendasi mereka walaupun didasarkan pada bukti yang kuat

Pengambil kebijakan mengeluhkan sulitnya mengakses dan memahami hasil penelitian pada saat diperlukan untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan

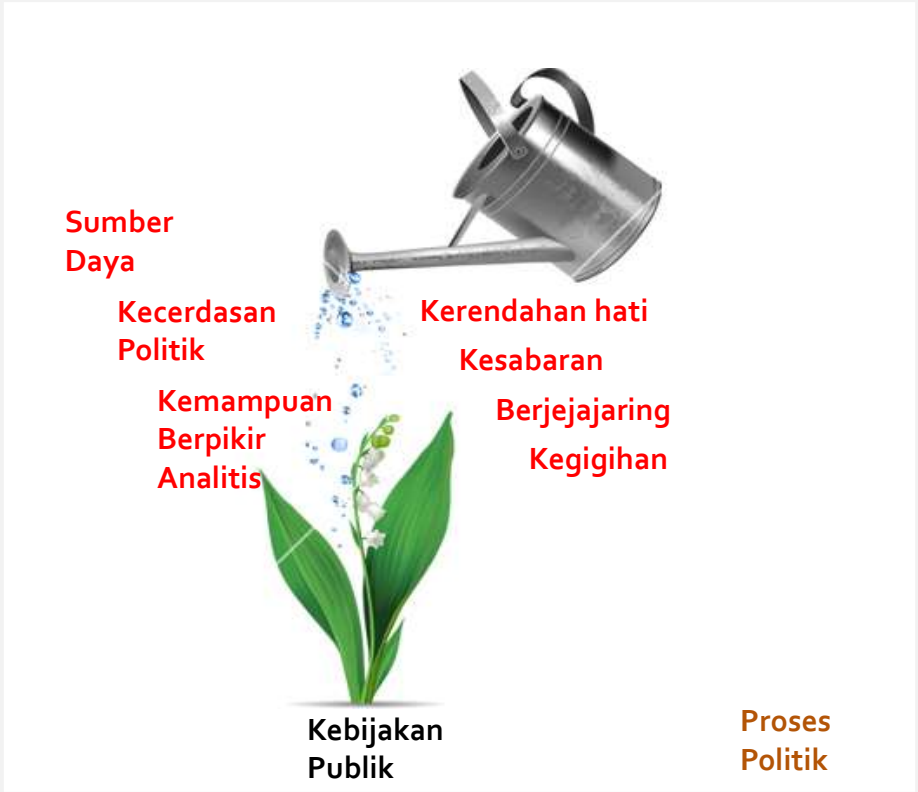
Pembuatan Kebijakan Publik adalah Sebuah Proses Politik





Seringkali, keputusan diambil berdasarkan apa yang sedang populer dalam jangka pendek bukan apa yang bisa berjalan dalam jangka menengah dan panjang

Politik Bukanlah Musuh
Pembuatan Kebijakan Publik Yang Berdasarkan Fakta



- Mengabaikan politik adalah mustahil karena kebijakan publik dibuat dalam konteks politik.
- Reformasi kebijakan publik membutuhkan keterampilan dan modal tambahan di luar hasil penelitian.

Proses Umum Pengambilan Kebijakan



Mengapa Diperlukan Kebijakan Berbasis Bukti?

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Orientasi Pelayanan Publik
4. Akuntabilitas
5. Demokrasi
6. Kepercayaan

Beberapa Jenis Bukti untuk Mendukung Pengambilan Kebijakan

Hasil Penelitian Bukanlah Satu-satunya Jenis Bukti



BLUSUKAN
merupakan salah satu alternatif cara pembuktian

Menerjemahkan Bukti Menjadi Kebijakan

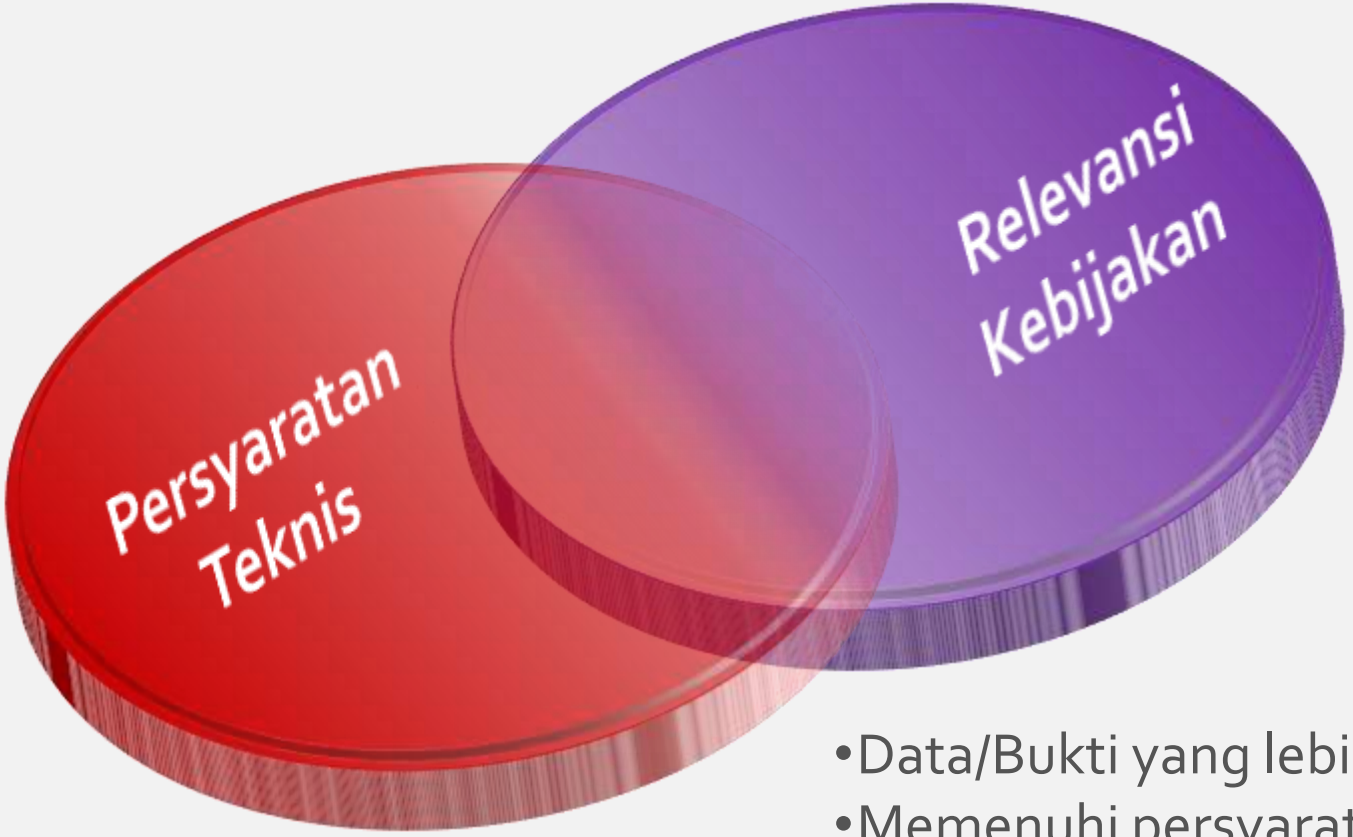
Meningkatkan Pemanfaatan Bukti dalam Pengambilan Kebijakan



- Bukti yang dapat diandalkan dan terpercaya
- Memperbaiki "kegunaan" bukti
- Penyebarluasan yang efektif
- Keterbukaan akses

- Memperoleh dukungan yang memadai
- Memiliki insentif untuk menggunakan bukti

Memadankan Persyaratan Teknis dan Relevansi Kebijakan



- Data/Bukti yang lebih baik
- Memenuhi persyaratan teknis
- Relevan dengan kebijakan

Menjembatani Perbedaan Gagasan Tentang Bukti

Bukti Bagi PENGAMBIL KEBIJAKAN

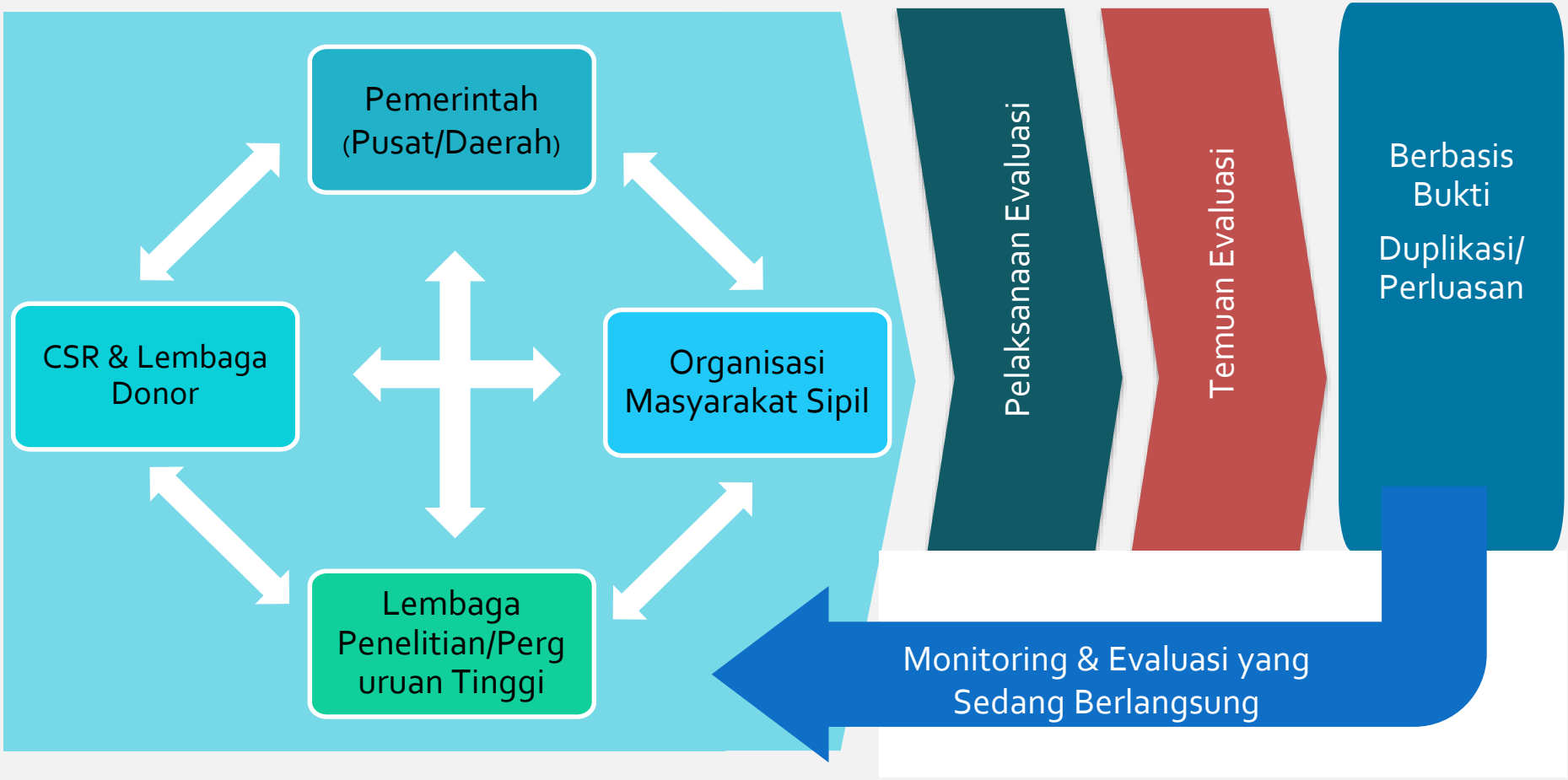
- Mudah dipahami (kontekstual)
- Apa pun yang tampak masuk akal
- Relevan dengan kebijakan
- Terikat waktu
- Pesan yang jelas

Bukti Bagi PENELITI

- 'Ilmiah' (bebas konteks)
- Terbukti secara empiris
- Berdasarkan suatu teori
- Tidak terikat waktu
- Kehati-hatian dan pembatasan/kualifikasi

Pembelajaran yang Dapat Diambil

Harmonisasi antara Pemerintah, Universitas dan Lembaga Penelitian



Kerja sama erat pemerintah, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya merupakan kunci utama untuk memperbaiki capaian pembangunan

Bagi Pembuat Kebijakan
(Pemerintah Pusat dan Daerah)

1. Kuasai keterampilan analisis dasar
2. Seleksi bukti yang ada
3. Kreatif dalam menjawab tantangan praktis (seperti keterbatasan waktu, tawar menawar yang bersifat politis)
4. Pertimbangkan skalabilitas program secara cermat
5. Jangan menganggap bahwa sebuah program bisa menjawab semua masalah (*one-size-fits-all mindset*)
6. Kembangkan kapasitas penelitan dalam lembaga

Bagi Produsen Pengetahuan
(Universitas dan Lembaga Penelitian)

1. Bangun reputasi dengan selalu menghasilkan riset yang tepercaya
2. Bersikap rendah hati dan terhormat; cerdas saja tidak cukup
3. Miliki sensitifitas politis dengan memahami "cara Indonesia"
4. Ajukan pertanyaan yang tepat dan pahami gambaran besarnya
5. Libatkan pemerintah sedari awal, sejak fase perancangan studi jika memungkinan, untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan analisis dan tantangan implementasi
6. Berkoordinasi sesering mungkin dengan semua pemangku kepentingan, terutama pembuat kebijakan di level atas
7. Terus pupuk keinginan untuk terus memberi input bagi kebijakan dengan membuat penelitian yang mudah dipahami dan relevan
8. Manfaatkan pengetahuan/data internal pemerintah

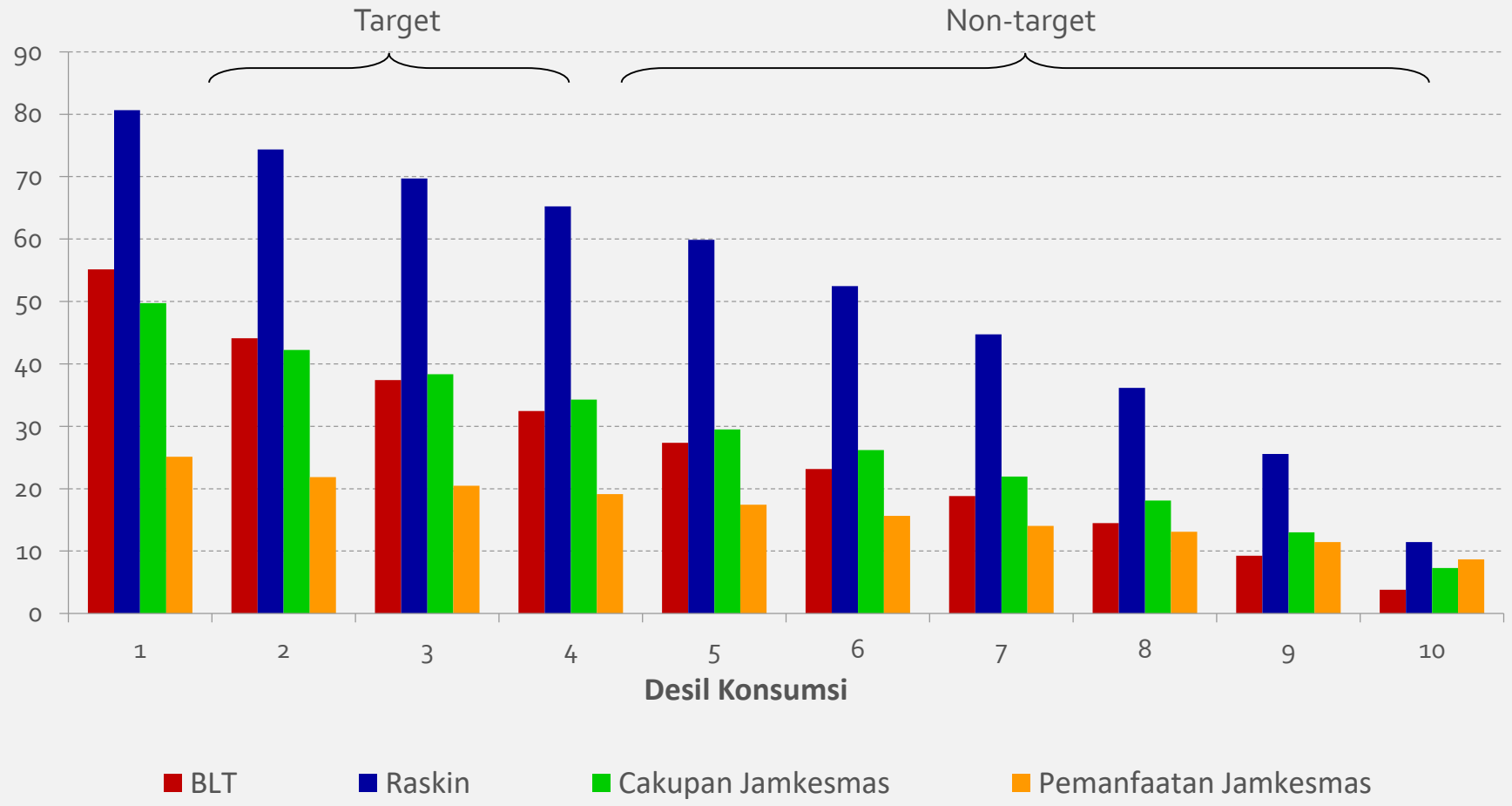
Terima kasih

Lampiran:

Pengalaman Indonesia dalam Menerapkan Kebijakan Berbasis Bukti

Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran:

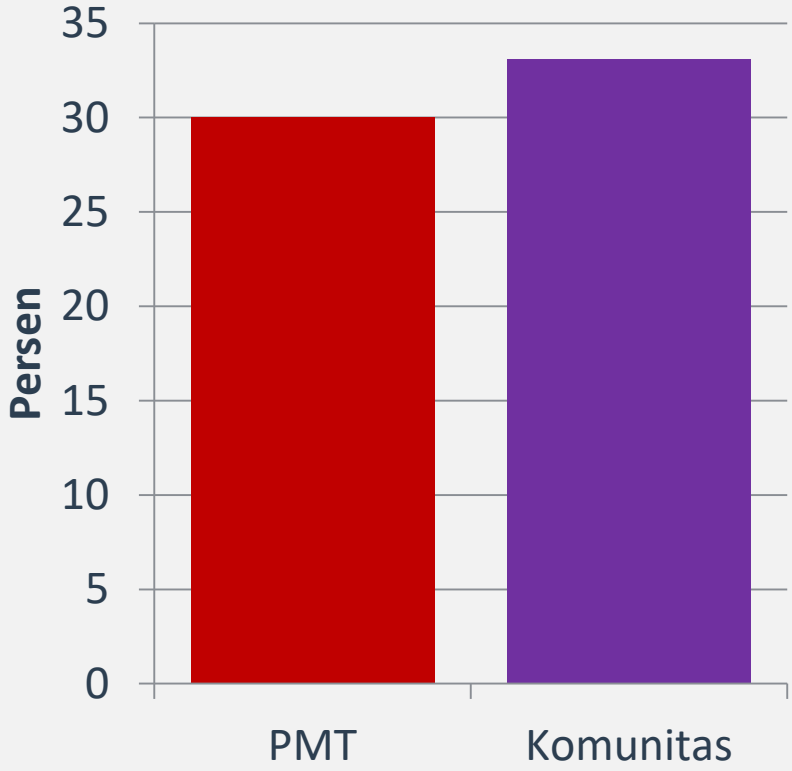
Fakta Tingginya Kekurangtepatan Sasaran Program (Tahun 2009)



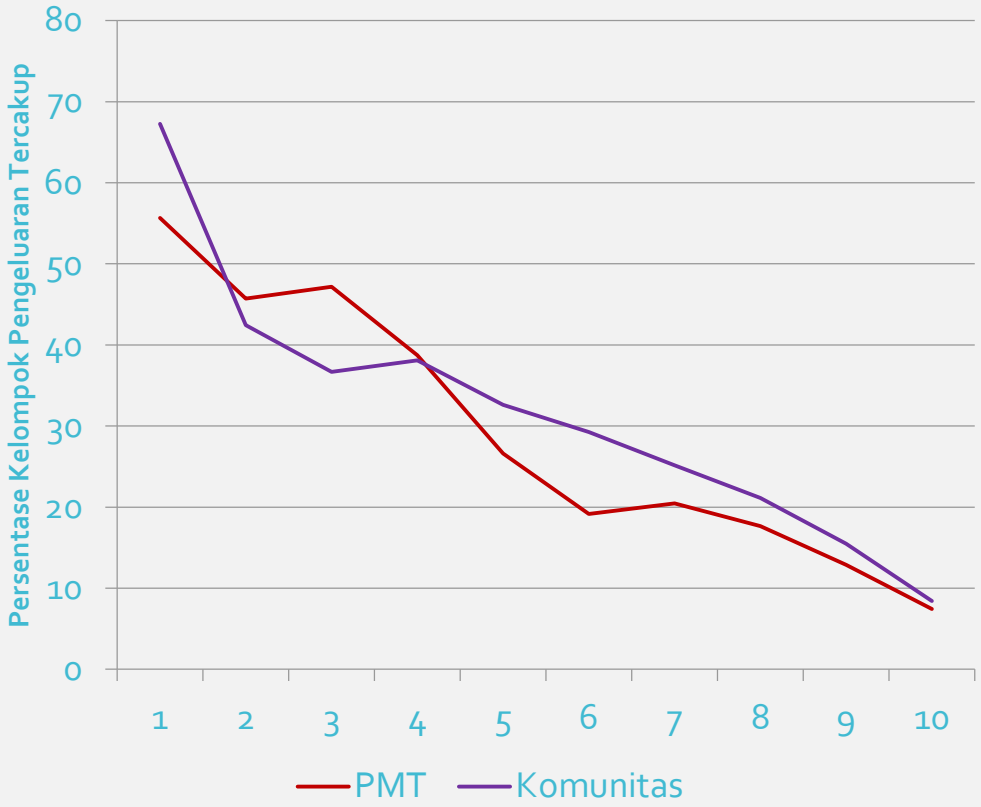
Sumber: Susenas 2009 dan perhitungan oleh staf Bank Dunia

Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran:

Studi untuk Menguji Beberapa Metode Penetapan Sasaran (Tahun 2010)



Sumber: JPAL dan Bank Dunia, 2010

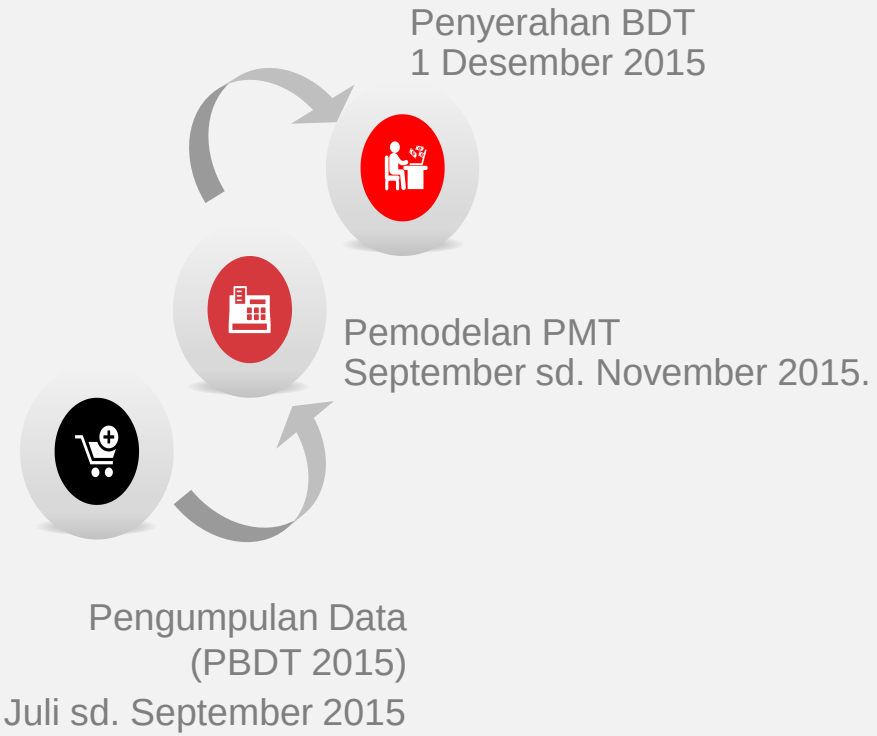


PMT Memberikan Hasil Yang Paling Akurat, sementara pendekatan Komunitas lebih baik dalam mengidentifikasi mereka yang paling miskin

Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran:
Pembangunan dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu tahun 2011

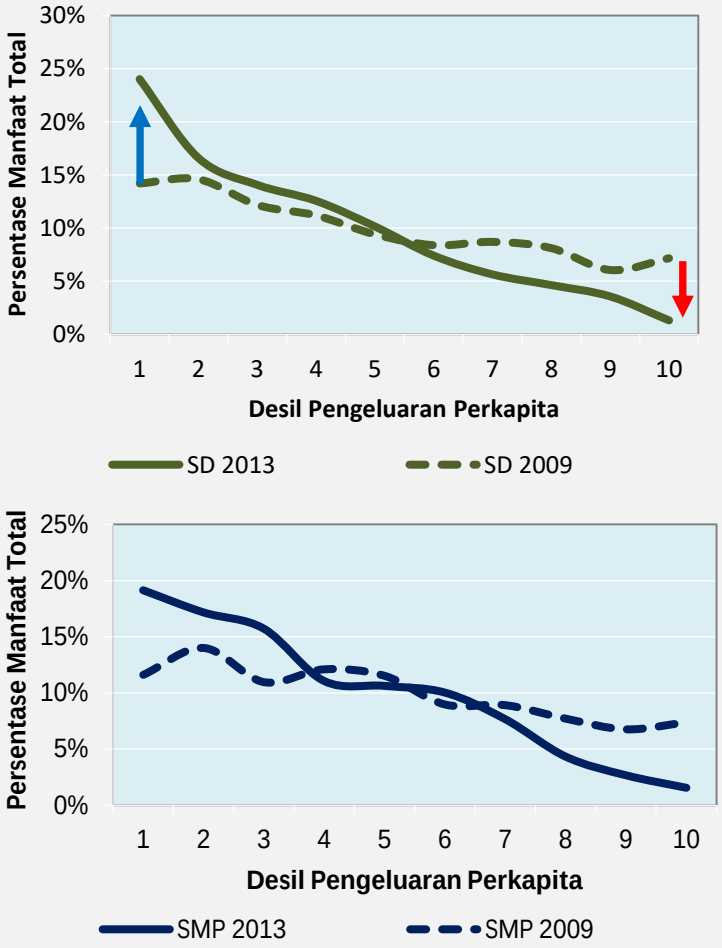
- Pendataan di tahun 2011 dengan mengkombinasikan metode PMT dan Konsultasi dengan RT miskin
- Pemutakhiran pada tahun 2015
- Dengan adanya inovasi mekanisme konsultasi publik
- Perluasan informasi karakteristik rumah tangga dan individu yang didata
- Penyempurnaan metode PMT
- Mencakup hampir 26 juta rumah tangga
- Telah dimanfaatkan oleh program nasional dan lebih dari 300 pemerintah daerah

Proses Pemuktahiran Database Terpadu

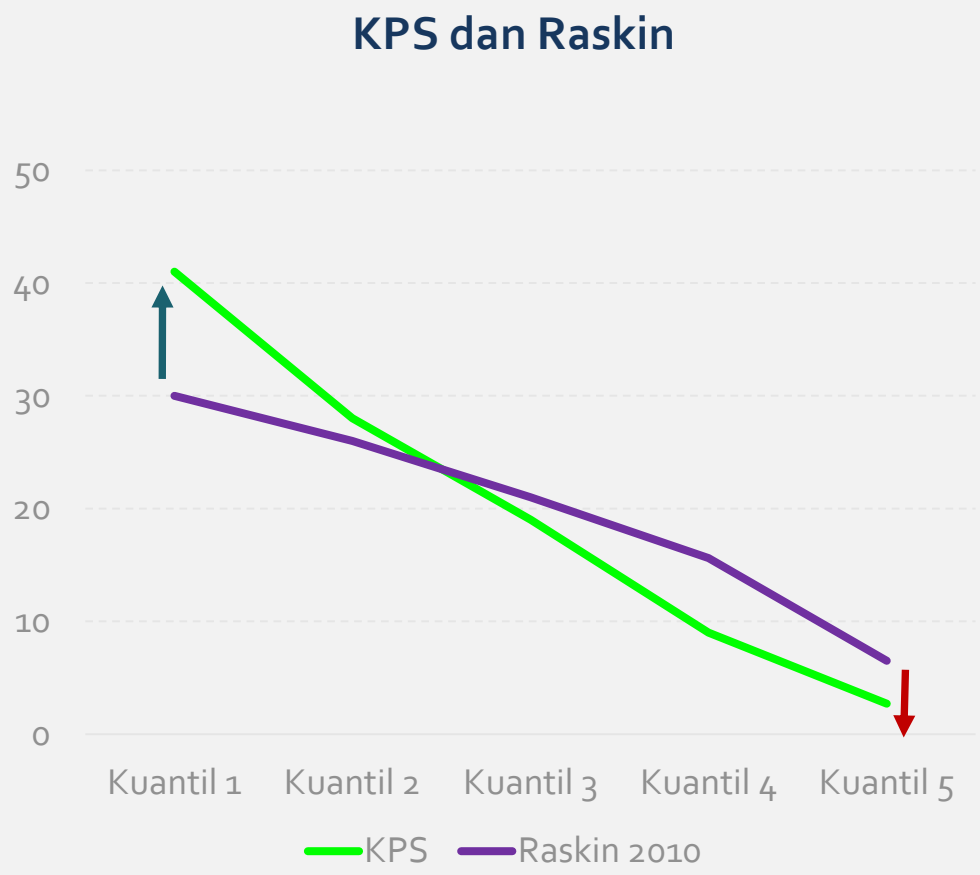


Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran:

Saat Ini Mulai Menunjukkan Hasil yang Diharapkan



Sumber: Susenas, 2009 dan 2013



Sumber:: Susenas 2010 (Raskin) dan Desember 2013 (KPS)

Mempertajam Penentuan Wilayah Prioritas



[1]
Menetapkan rangking atau urutan kesejahteraan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan kemiskinan multidimensi

[2]
Memilih dan memilah wilayah (Kab/Kec/Desa) yang menjadi target kedalam **Grup Prioritas** sebagai dasar penargetan kantong-kantong kemiskinan

[1] Menentukan alokasi biaya berdasarkan indikator capaian dan skala prioritas
[2] Menentukan alokasi bantuan yang akan didistribusikan berdasarkan pendekatan *geographic targeting*.

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme pemantauan terpadu.

Meminimalkan kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan kualitas dan kuantitas ***supply side*** antar wilayah

Pemerataan kesempatan (*equality of opportunity*) di berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, dst)

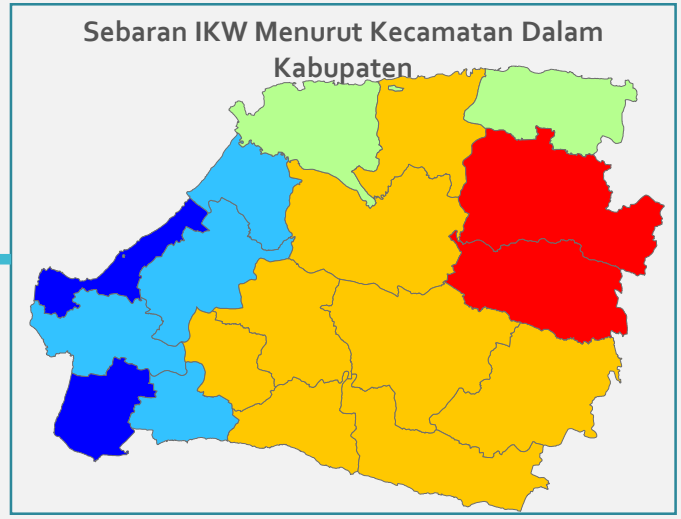
Indeks Kesejahteraan Wilayah (IKW) merupakan embrio penetapan sasaran berbasis geografis dan diterapkan secara penuh untuk mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015 hingga saat ini dan reformulasi dana desa tahun 2018

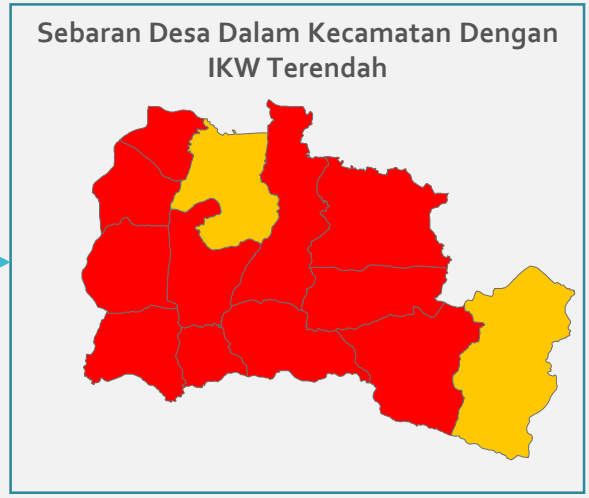
Pemanfaatan Metode Penetapan Sasaran Berbasis Wilayah:

Sebaran Menurut Klasifikasi Wilayah

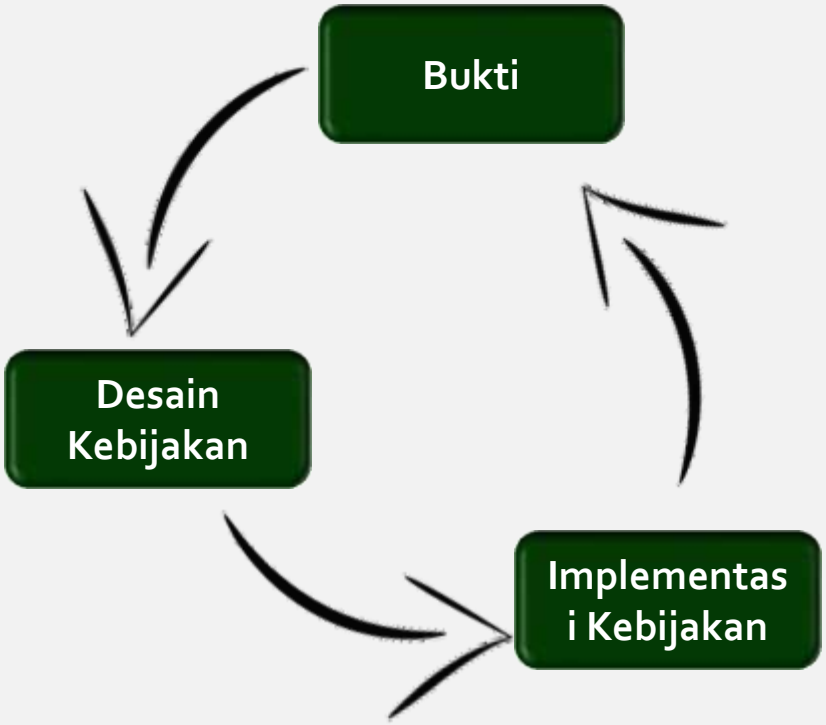


Kelompok Wilayah	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Kelompok 1 – Sangat Rendah	2	35
Kelompok 2	4	51
Kelompok 3	2	66
Kelompok 4	8	72
Kelompok 5 - Sangat Tinggi	2	56





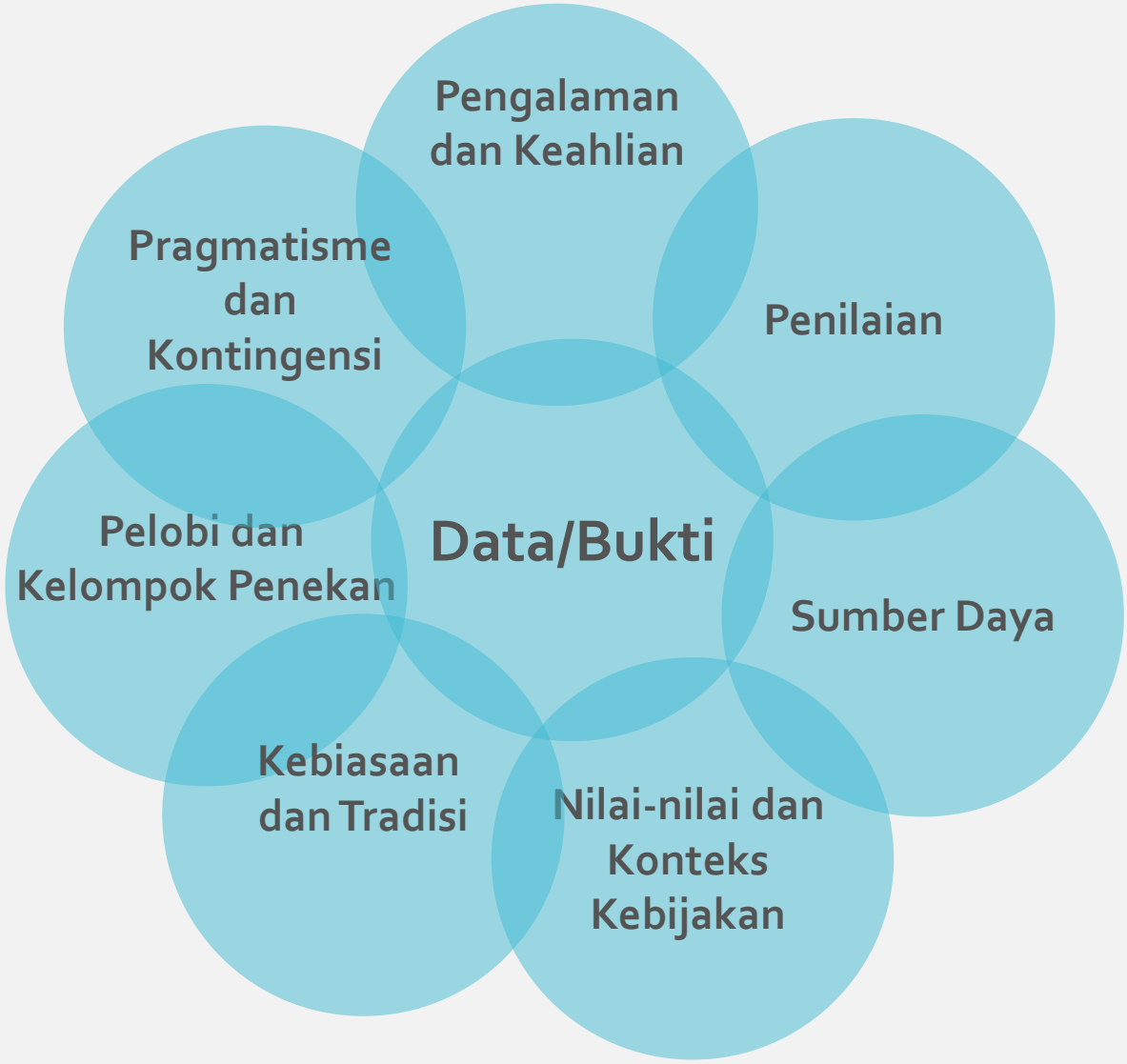
Yang Dimaksud dengan Kebijakan Berbasis Bukti



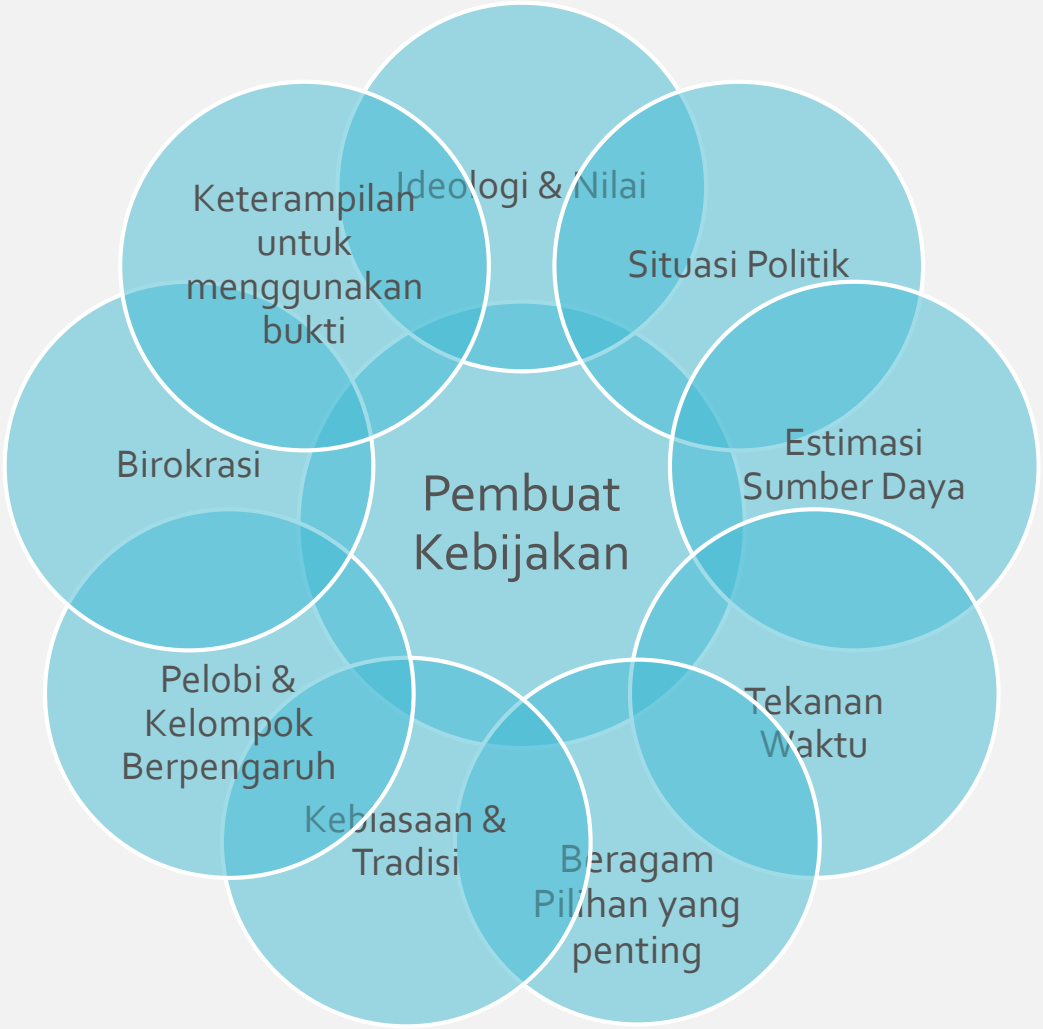
Kebijakan yang dirumuskan berdasarkan:

- Kajian mendalam serta…
- Penelitian-penelitian pendukung dengan…
- **Menempatkan bukti terbaik** sebagai dasar untuk…
- Membantu pengambil keputusan memperoleh informasi penuh mengenai kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan…
- Kebutuhan kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan

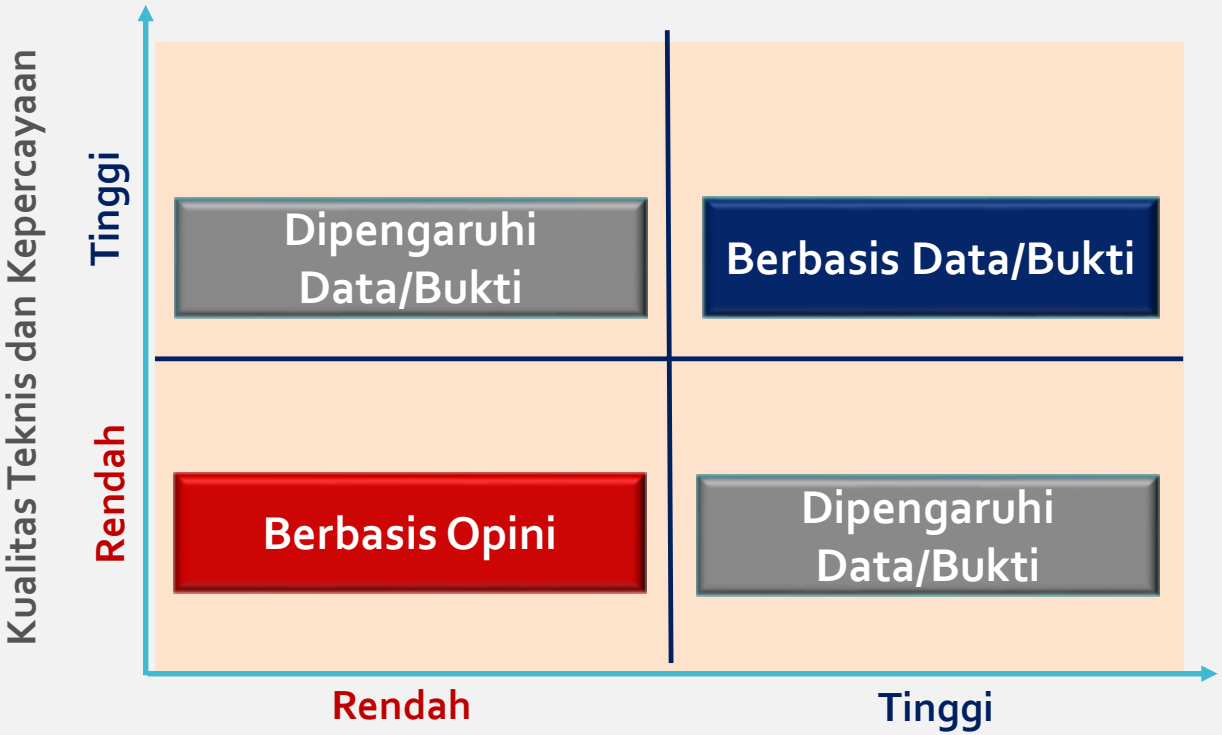


Penelitian dan Pembuktian



Penelitian adalah proses yang tidak linear. Seringkali, penelitian merupakan input kecil dari banyak faktor tambahan yang memengaruhi keputusan pembuat kebijakan.

Menuju Kebijakan Berbasis Bukti



- Hasil studi sebelumnya
- Hasil dari evaluasi
- Hasil dari studi kualitatif
- Hasil dari eksperimen dan kuasi-eksperimen
- Hasil survei dan data administratif
- Metode konsultatif

- Kehidupan politik
- Ketepatan waktu analisis
- Penilaian
- Pengalaman

- Sumber daya
- Sistem lobi (*think-tank*, pembentuk opini, media, ormas)